JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.3, No.7 Juli 2025
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

DAMPAK PERUBAHAN IDEOLOGI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Oleh:

Andika Pratama

Universitas Malikussaleh
Alamat: Jl. Cot Teungku Nie, Reuleut Barat, Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara,Aceh (24355).
Korespondensi Penulis: andikapratamaa7551@gmail.com.

Abstract. *Ideological shifts have had a significant impact on the governmental systems of nations, including Indonesia. This journal aims to examine the influence of political ideology changes on the development of Indonesia's system of governance from independence to the contemporary era. Through a historical approach and critical analysis, this study explores how ideological transitions from Pancasila as the foundational state philosophy to the influence of global ideologies such as liberalism and socialism have shaped various aspects of state governance, including the separation of powers, legislative-executive dynamics, and public policy. The findings reveal that ideological changes across different periods, including the Old Order, New Order, and Reform eras, have played a key role in shaping national policies, governmental structures, and Indonesia's political culture. This study also highlights the challenges Indonesia faces in maintaining political stability amid a continually evolving landscape of ideological pluralism at both domestic and global levels.*

Keywords: *Ideology, Government System, Indonesia, Pancasila, Political Change, Reform.*

Abstrak. Perubahan ideologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pemerintahan suatu negara, termasuk Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dampak perubahan ideologi politik terhadap perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan hingga era kontemporer. Melalui pendekatan historis dan

Received June 16, 2025; Revised June 25, 2025; July 11, 2025
*Corresponding author: *andikapratamaa7551@gmail.com*

analisis kritis, penelitian ini mengeksplorasi dengan transisi ideologis, mulai dari Pancasila sebagai dasar negara hingga pengaruh ideologi global seperti liberalisme dan sosialisme, telah membentuk berbagai aspek tata kelola negara, seperti pembagian kekuasaan, dinamika legislatif-eksekutif, dan kebijakan publik. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research)* pada buku, artikel-artikel, jurnal dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan ideologi yang terjadi dalam berbagai periode, termasuk era orde lama, orde baru, dan reformasi berperan dalam membentuk kebijakan negara, struktur pemerintahan, dan budaya politik Indonesia. Studi ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di tengah pluralisme ideologi yang terus berkembang di tingkat domestik dan global.

Kata Kunci: Ideologi, Sistem Pemerintahan, Indonesia, Pancasila, Perubahan Politik, Reformasi.

LATAR BELAKANG

Suatu ideologi mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang di cita-citakan, dasar pikiran yang terdalam, serta gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Hal itu menjadi pedoman bagi suatu bangsa agar memiliki pola dalam menyelenggarakan program pembangunan. Dengan demikian, ideologi suatu bangsa adalah penegasan dari nilai- nilai yang dimiliki diyakini kebenarannya, serta menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Sumber ideologi suatu bangsa pada umumnya adalah budaya dan pengalaman sejarah masyarakatnya. Oleh sebab itu, ideologi bangsa dinyatakan oleh para pendiri bangsa sebagai suatu hal yang harus diwariskan kepada generasi penerus secara turun temurun dan menjadi sikap hidup bagi masyarakat pendukungnya.[1] Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika ideologi ini. Setiap perubahan yang terjadi, baik karena faktor politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika ideologi ini. Setiap

[1] Taupan. M dan Ariyani. I. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Bandung:yrama widya.

perubahan yang terjadi, baik karena faktor politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

Globalisasi teknologi juga dapat melampaui batas ideologis, di mana teknologi seperti internet dan media sosial memberikan ruang bagi berbagai pandangan ideologi untuk bersaing dan berdialog secara lebih luas. Namun, negara-negara dengan ideologi yang berbeda dapat merespons globalisasi teknologi ini dengan cara yang beragam, seperti menerapkan kebijakan proteksionisme digital, sensor, atau bahkan menciptakan teknologi alternatif lokal. Akibatnya, perkembangan teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi internal suatu negara, tetapi juga oleh dinamika global yang terus berubah. Dalam konteks sejarah perubahan ideologi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik sejak masa penjajahan, kemerdekaan, hingga era reformasi. Sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia berada di bawah kendali kolonial belanda yang menerapkan sistem pemerintahan sentralistis dengan orientasi kepentingan colonial. Pada masa ini, meskipun gerakan kebangsaan mulai muncul, wacana ideologi belum berkembang secara signifikan karena keterbatasanruang gerak dan kekuasaan bangsa Indonesia.

Setelah Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara. Perjalanan ideologi ini tidak selalu berjalan mulus. Indonesia sempat melalui beberapa perubahan bentuk pemerintahan yang dipengaruhi oleh pergeseran ideologi, mulai dari sistem presidensial pada masa Orde Lama, sistem demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Setiap perubahan ideologi yang terjadi berdampak pada struktur dan mekanisme pemerintahan.

Salah satu perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia terjadi ketika Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Sistem ini menggantikan sistem demokrasi parlementer yang sebelumnya dianut. Pergeseran ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakstabilan politik pada saat itu, tetapi juga dipengaruhi oleh gagasan- gagasan ideologis yang berkembang di kalangan elit politik Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan eksekutif diperkuat, sementara peran legislatif dan partai-partai politik dilemahkan. Dampaknya, pemerintahan menjadi lebih sentralistis dengan pengaruh besar dari presiden. Namun sistem pemerintahan ini kemudian berubah lagi ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan dan menerapkan sistem demokrasi Pancasila pada era orde baru. Pada masa ini, ideologi Pancasila dikembangkan sebagai

satu-satunya asas dalam kehidupan politik dan sosial sistem pemerintahan di bawah Soeharto lebih stabil secara politik, namun cenderung otoriter. Pemerintah mengontrol ketat setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk media dan kebebasan berbicara. Dampak dari sistem ini adalah terciptanya stabilitas jangka pendek, tetapi juga munculnya berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan dan korupsi di kalangan pemerintahan.

Perubahan ideologi kembali terjadi pada era Reformasi tahun 1998, ketika Presiden Soeharto lengser dari kekuasaan setelah 32 tahun memimpin Reformasi membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Pergeseran ideologi dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi liberal memperkenalkan berbagai perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan, termasuk kebebasan pers, otonomi daerah, serta penguatan lembaga Legislatif dan Yudikatif. Dampak dari perubahan ideologi ini sangat terasa dalam transisi sistem pemerintahan dari yang sebelumnya sangat sentralistik menjadi lebih desentralistik dan demokratis. Selain itu, reformasi juga membawa tantangan tersendiri, seperti munculnya gerakan separatisme di beberapa daerah, korupsi yang semakin merajalela, serta melemahnya penegakan hukum.

Dampak dari perubahan ideologi terhadap sistem pemerintahan Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode utama: periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, meskipun ada upaya untuk menerapkan Pancasila secara konsisten, namun dinamika politik yang tidak stabil menyebabkan munculnya sistem Demokrasi Terpimpin yang lebih sentralistis. Pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, namun dalam praktiknya pemerintahan menjadi sangat otoriter. Sedangkan pada masa Reformasi, ideologi Pancasila kembali diinterpretasikan dalam kerangka demokrasi yang lebih terbuka meskipun tantangan baru terus muncul dalam upaya menstabilkan sistem pemerintahan.

Dalam konteks global, perubahan ideologi dalam sistem pemerintahan di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika internasional. Misalnya, pada era Perang Dingin, Indonesia berada di bawah tekanan untuk memilih antara ideologi kapitalis Barat atau komunis Timur. Hal ini tercermin dalam kebijakan politik luar negeri dan domestik Indonesia yang cenderung bergeser mengikuti arus politik global. Namun dengan adanya Reformasi Indonesia kini lebih menegaskan posisinya sebagai negara demokrasi yang berdaulat dengan ideologi Pancasila sebagai pedoman utama.

Penelitian ini penting untuk terus mengkaji perubahan ideologi, memberikan dampak pada sistem pemerintahan di Indonesia, serta tantangan-tantangan baru yang muncul pada pemerintahan Indonesia dapat diatasi melalui penguatan kembali ideologi Pancasila. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara ideologi dan sistem pemerintahan tidak hanya akan membantu dalam memahami sejarah politik Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan di masa depan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai "Dampak Perubahan Ideologi terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia".

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research)* pada buku, artikel-artikel, jurnal dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini juga sering digunakan dalam menganalisis fenomena dan aktivitas yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif menerjemahkan data yang berkaitan dengan keadaan sosial, koneksi antar individu yang terjadi, serta munculnya fakta yang ada dampaknya terhadap lingkungan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) secara khusus dan masyarakat luas secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lainnya.[2] Perubahan ideologi yang dialami Indonesia dari masa Orde Lama hingga Reformasi telah berdampak besar pada sistem pemerintahan negara ini. Berikut adalah beberapa dampak utama dari perubahan ideologi terhadap sistem pemerintahan Indonesia:

a. Sentralisasi dan Desantralisasi

[2] Noviati, C. E. 2013. Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 333-354.

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sentralisasi berasal dari bahasa inggris yang berakar dari kata *Centre* yang artinya adalah pusat atau tengah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal. [3]Berdasarkan kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa sentralisasi dan desentralisasi adalah dua istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontinum. Karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebaliknya juga tidak mungkin penyelenggaraan

[3] Nuradhawati., R. 2019. Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja.* 2(1).

pemerintahan hanya didasarkan pada azas desentralisasi saja Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, di mana kekuasaan terpusat di tangan presiden dan pemerintah pusat. Namun setelah Reformasi, Indonesia beralih ke sistem yang lebih desentralistik, di mana daerah-daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik dan administrasi.

b. Otoritariatisme-Demokrasi

Otoritarianisme merupakan tindakan yang melampaui otoritas atau kekuasaan yang dimandatkan sedemikian rupa sehingga menyelewengkan atau mengambil alih kekuasaan dari pemberi mandat dan tindakan dari orang-orang yang menggunakan simbolisme dari komunitas interpretasi hukum tertentu untuk mendukung argumentasi. Masa Orde Baru ditandai oleh otoritarianisme yang kuat, dengan sedikit ruang bagi kebebasan politik dan partisipasi rakyat. Namun pada era Reformasi, Indonesia beralih ke sistem demokrasi liberal, di mana pemilu yang bebas dan adil menjadi bagian integral dari sistem politik. Parlemen dan partai politik memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, dan masyarakat sipil memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengkritik pemerintah.

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal masa kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*Demokrati*a" yang berarti Kekuasaan Rakyat. Demokrasi berasal dari kata "*Demos*" dan "*Kratos*". *Demos* yang memiliki arti Rakyat dan *Kratos* yang memiliki arti Kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :

1. Menurut Joseph A. Schemer, Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik

dimana individu- individu memperoleh Kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

2. Menurut Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih.
4. Menurut Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.

c. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita

penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional - di mana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an seperti telah disinggung di muka itu menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi kan pada pertumbuhan GNP saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar di NSB. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di NSB yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi secara sempit.[4]

Oleh karena itu, Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance),* (2) meningkatnya rasa harga diri (*selfesteem)* masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.[5]

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut: 1. suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu; 2. usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita; 3. peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang; 4. perbaikan

[4] Arsyad, L. 2017. Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. *Tersedia secara online di: http://www. pustaka. ut. ac. id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M*

[5] Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2003. Economic Development, Eight Edition. England: Pearson Education Limited.

sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). sistem kelembagaan ini bisa ditinjau.[6]

Strategi pembangunan ekonomi yang masyarakat stabilitas politik melalui tindakan "kekerasan" itu oleh Feith (1984) disebut sebagai rezim pembangunan yang represif (represive developmental rezim), yang ciri-cirinya adalah: pemerintahan pada berbagai level, mulai dari level atas atau pusat sampai ke tingkat bawah, daerah, melibatkan kaum militer; pembangunan ekonomi diatur oleh para teknokrat dan elit birokrasi dengan sistem perencanaan terpusat; lembaga-lembaga demokrasi yang konvensional, seperti partai politik dan legislatif, serta kekuatan- kekuatan politik yang ada dalam masyarakat, kelompok sipil, dibatasi ruang gerak dan kegiatannya (Feith, 1984). Oleh Karl D. Jackson (1978) model pengambilan keputusan yang dilakukan para birokrat tinggi yang jumlahnya terbatas itu disebut bureaucratic polity. Sedangkan Clifford Geertz menyebutnya sebagai power house state, di mana para pejabat cenderung menjadikan diri mereka sebagai kepala (master), bukan manajer (manager).

Pada masa Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui pembangunan, namun hal ini dilakukan dengan mengorbankan kebebasan politik dan pemerintahan yang bersih. Reformasi berusaha memperbaiki ini dengan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, namun Indonesia masih berjuang untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Perubahan Ideologi

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan ideologi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Perubahan ideologi ini sangat memengaruhi sistem pemerintahan dan dinamika politik Indonesia. Dari masa Orde Lama dengan semangat nasionalisme dan sosialisme, orde baru dengan ideologi pembangunan yang otoriter, hingga era Reformasi

[6] Arsyad, L. 2017. Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Tersedia secara online di: http://www. pustaka. ut. ac. id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.

dengan semangat demokratisasi, setiap periode ini meninggalkan dampak yang berbeda pada tatanan pemerintahan Indonesia.

Perubahan ideologi tersebut tidak hanya mempengaruhi politik, tetapi juga struktur sosial, ekonomi, dan hubungan Internasional Indonesia jurnal ini akan membahas dampak perubahan ideologi terhadap sistem pemerintahan Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan hingga era Reformasi meliputi:[7]

a. Orde Lama: Nasionalisme, Sosialisme, dan Demokrasi Terpimpin (1945-1966)

   Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh Soekarno, yang menggabungkan berbagai ideologi dalam konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Saat itu, Indonesia berusaha menemukan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya yang heterogen. Ideologi yang dominan adalah nasionalisme, di mana kepentingan nasional menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintahan.

   Pada awal 1950-an, Indonesia menganut sistem parlementer dengan demokrasi liberal. Namun, ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh seringnya pergantian kabinet membuat Soekarno memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Demokrasi Terpimpin ini didasarkan pada ide bahwa negara harus dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik yang kuat, dan mengurangi peran partai politik serta parlemen dalam pemerintahan. Dalam periode Demokrasi terpimpin, Soekarno mencoba mengintegrasikan unsur sosialisme dalam pemerintahan ialah berupaya memperjuangkan ide ekonomi berdikari dan menasionalisasi perusahaan- perusahaan asing. Dampaknya, negara mulai mengambil alih sektor-sektor strategis, seperti minyak dan gas, namun pada akhirnya perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan mengalami inflasi yang sangat tinggi.

[7] Hadi, S. 2006. Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional. Yayasan Obor Indonesia.

Demokrasi segi politik terpimpin membawa dampak yang besar pada sistem pemerintahan Indonesia. Sistem yang sebelumnya menganut asas demokrasi parlementer berubah menjadi sistem yang sangat sentralistik dengan kekuasaan besar berada di tangan presiden. Hal ini menyebabkan matinya partisipasi politik yang sehat dan bebas, yang akhirnya membawa Indonesia menuju ketidakstabilan politik.

b. Orde baru: Pembangunan dan Otoritarianisme (1966-1998)

Setelah jatuhnya Soekarno dan peristiwa G305/PKI pada tahun 1965, Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan dukungan militer. Pada masa Orde Baru, ideologi pembangunan menjadi sentral dalam pemerintahan Soeharto. Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, dan pemerintah memusatkan kekuasaan di tangan presiden untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi. Di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun dengan harga otoritarianisme dan represi politik.

Sistem pemerintahan selama Orde Baru sangat otoriter. Soeharto membentuk pemerintahan yang sentralistik dan represif, dengan militer memainkan peran yang sangat dominan dalam politik Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun hanyalah formalitas belaka, di mana Golongan Karya (Golkar) yang didukung oleh pemerintah selalu memenangkan pemilu. Kebebasan pers dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah ditekan dengan cara-cara kekerasan.

Dalam Ideologi Orde Baru mengesampingkan ide-ide sosialisme dan komunisme, bahkan mengkriminalisasi segala bentuk ajaran yang berbau komunis. Orde Baru sangat berfokus pada ideologi anti- komunis, dan hal ini mempengaruhi banyak aspek kebijakan, termasuk hubungan luar negeri, di mana Indonesia lebih mendekat ke blok Barat selama Perang Dingin.

c. Era Reformasi: Demokrasi dan Liberalisasi (1998-sekarang)

Krisis ekonomi Asia 1997-1998 dan ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela akhirnya memaksa Soeharto turun dari jabatannya pada tahun 1998. Kejatuhan Soeharto

menandai awal dari era Reformasi, di mana Indonesia mulai beralih menuju sistem yang lebih demokratis. Reformasi merupakan reaksi terhadap ideologi pembangunan otoritarianisme Orde Baru, dan fokus pada penciptaan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan demokratis.

Pada masa Reformasi, ideologi yang berkembang adalah demokrasi liberal, dengan penekanan pada hak asasi manusia, desentralisasi, dan penguatan peran parlemen serta masyarakat sipil. Sejak Reformasi, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan, termasuk amandemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan presiden, meningkatkan otonomi daerah, serta memperkenalkan pemilu yang lebih bebas dan adil.

Dampak Perubahan Ideologi Sistem Pemerintah Indonesia

Indonesia sebagai negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945 telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia erat kaitannya dengan ideologi negara yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi fondasi dalam setiap kebijakan dan aturan pemerintahan yang dijalankan. Namun sepanjang sejarah, perubahan dalam ideologi dan sistem pemerintahan di Indonesia terjadi melalui berbagai periode, mulai dari era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga masa reformasi. Setiap perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap stabilitas politik, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.[8]

1. Demokrasi Liberal (1949-1959)

   Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer yang dikenal sebagai Demokrasi Liberal. Pada masa ini, Indonesia menerapkan konstitusi sementara yang dikenal sebagai Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Sistem ini memungkinkan presiden hanya berfungsi sebagai kepala

[8] Dasfordate, A. 2022. Pertentangan Ideologi Antar Tokoh Nasional Dalam Mencari Format Kenegaraan Awal Kemerdekaan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*: Media Kajian Pendidikan Sejarah, Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 174-184.

negara, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.

Dampak Positif:

a) Kebebasan Berpendapat dan Berpolitik: Pada masa Demokrasi Liberal, kebebasan berpendapat dan berpolitik berkembang dengan pesat. Berbagai partai politik bermunculan dan ikut serta dalam proses pemilihan umum.
b) Pluralisme Politik: Sistem multipartai yang diterapkan memberi kesempatan bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi politik mereka.

Dampak Negatif:

a) Instabilitas Politik: Tingginya jumlah partai politik yang bersaing mempersulit terciptanya pemerintahan yang stabil. Sering terjadi pergantian kabinet yang berdampak pada kelangsungan kebijakan pemerintahan.
b) Lemahnya Otoritas Pemerintah: Kekuasaan yang terpecah antara presiden dan parlemen membuat pemerintahan menjadi tidak efektif.

Ketidakstabilan politik menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Menyadari kekacauan politik yang terjadi pada era Demokrasi Liberal, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri sistem parlementer dan kembali ke UUD 1945. Periode ini dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan terpusat di tangan presiden. Soekarno berusaha menggabungkan berbagai ideologi, termasuk nasionalisme, agama, dan komunisme yang dikenal dengan istilah NASAKOM.

Dampak Positif:[9]

[9] Noviati, C. E. 2013. Demokrasi dan sistem pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 333-354.Nuradhawati., R. 2019. Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia.Jurnal Academia Praja. 2(1).

a) Sentralisasi Kekuasaan: Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden memperkuat otoritas negara dan mempercepat pengambilan keputusan.
b) Peningkatan Identitas Nasional: Soekarno berfokus pada penguatan identitas nasional melalui kebijakan anti-imperialisme dan gerakan non-blok, sehingga meningkatkan kebanggaan dan solidaritas nasional.

Dampak Negatif:

a) Pembatasan Demokrasi: Demokrasi Terpimpin mengurangi peran partai politik dan membatasi kebebasan berpendapat. Pers dan oposisi dipaksa untuk tunduk pada pemerintah.
b) Krisis Ekonomi: Pembangunan ekonomi terhambat akibat kebijakan- kebijakan populis yang tidak berbasis pada pertimbangan ekonomi yang rasional. Akibatnya, inflasi meroket dan terjadi krisis ekonomi yang parah.
c) Kudeta 1965 dan Keruntuhan Soekarno: Ketegangan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis mencapai puncaknya pada tahun 1965 dengan terjadinya Gerakan 30 September. Peristiwa ini berujung pada kudeta militer dan jatuhnya Soekarno.

3. Orde Baru (1966-1998)

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, Jenderal Soeharto mengambil alih Kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi yang stabil dengan pendekatan teknokratis dan kontrol politik yang ketat. Soeharto juga mengadopsi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi sosial dan politik.

Dampak Positif:[10]

[10] Ine Ariyani dan Taupan, M. "Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan" (2017): 2015. http://www.fkip.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/Hasil-Tes-Online2015.pdf.

a) Stabilitas Politik: Melalui kontrol yang ketat terhadap partai politik dan media, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif stabil selama tiga dekade.
b) Pertumbuhan Ekonomi: Orde Baru berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi asing.
c) Pembangunan Sosial: Pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi mengalami kemajuan pesat. Angka kemiskinan berhasil ditekan, dan taraf hidup masyarakat meningkat.

Dampak Negatif:

a) Otoritarianisme: Soeharto menjalankan pemerintahan otoriter dengan membatasi kebebasan politik dan memonopoli kekuasaan. Organisasi sosial dan politik harus tunduk pada Pancasila sebagai asas tunggal, dan militer memiliki peran besar dalam pemerintahan.
b) Korupsi dan Nepotisme: Kebijakan sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto dan kroni-kroninya menciptakan korupsi yang meluas di seluruh lapisan pemerintahan. Nepotisme juga menguat, terutama dengan diberikannya kekuasaan ekonomi dan politik kepada keluarga serta kerabat dekat Soeharto.
c) Krisis 1998 dan Kejatuhan Orde Baru: Krisis ekonomi Asia 1997-1998 mengakibatkan keruntuhan ekonomi Indonesia, yang memicu protes massal dan kejatuhan Soeharto pada Mei 1998.

4. Reformasi (1998-Sekarang)

Kejatuhan Soeharto menandai dimulainya era Reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mengakhiri praktik-praktik otoritarianisme Orde Baru. Periode ini ditandai dengan kebebasan politik yang lebih luas, desentralisasi kekuasaan, serta reformasi dalam bidang hukum dan pemerintahan.

Dampak Positif:[11]

a) Desentralisasi dan Demokrasi Lokal: Salah satu kebijakan utama era Reformasi adalah otonomi daerah, yang memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal. Desentralisasi ini memperkuat demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
b) Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi: Reformasi membuka ruang bagi kebebasan berpendapat, pers yang independen, serta kebebasan berorganisasi bagi berbagai kelompok masyarakat. Kebebasan ini memungkinkan berbagai elemen masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa rasa takut.
c) Reformasi Hukum: Reformasi di bidang hukum melibatkan upaya untuk memberantas korupsi, memperkuat sistem peradilan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.

Dampak Negatif:

a) Ketidakstabilan Politik: Meskipun era Reformasi membawa kebebasan politik yang lebih luas, hal ini juga berdampak pada munculnya ketidakstabilan politik akibat konflik kepentingan antara berbagai kelompok. Pemilihan langsung juga sering kali diwarnai dengan praktik politik uang dan manipulasi.
b) Korupsi yang Belum Tuntas: Meskipun reformasi hukum terus dilakukan, korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Praktik korupsi di tingkat daerah sering kali meningkat seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang tidak disertai dengan pengawasan yang kuat.
c) Kesenjangan Ekonomi: Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, kesenjangan antara kaya

[11] Ibidh,

dan miskin semakin melebar. Reformasi belum mampu sepenuhnya mengatasi masalah kesenjangan ekonomi yang mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perubahan ideologi memiliki dampak fundamental terhadap sistem pemerintahan Indonesia di berbagai periode sejarah. Dari awal kemerdekaan hingga era kontemporer, dinamika politik dan perubahan ideologis terus mempengaruhi struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Orde Lama (1945-1965) pada masa ini, Indonesia mengalami fluktuasi ideologi yang berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan. Penerapan ideologi Pancasila sebagai dasar negara ditantang oleh berbagai ideologi lain, seperti sosialisme, komunisme, dan islamisme. Di bawah kepemimpinan Soekarno, muncul gagasan NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang mencoba merangkul semua kekuatan politik. Namun, pendekatan ini memperlemah stabilitas politik karena ketegangan ideologis di antara kelompok-kelompok tersebut, yang berujung pada krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Penerapan pemerintahan yang semakin terpusat dan otoriter mengurangi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Orde Baru (1966-1998) yang dipimpin oleh Soeharto, ideologi yang dominan adalah Pancasila yang diinterpretasikan secara pragmatis sebagai alat untuk stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Orde Baru membawa stabilitas politik dengan memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif dan militer, serta membatasi peran partai politik dan kelompok masyarakat sipil. Ideologi pembangunan *(developmentalisme)* menjadi pusat perhatian, dengan pertumbuhan ekonomi yang diutamakan di atas hak-hak politik individu. Meskipun Indonesia mencapai kemajuan ekonomi, sistem yang terlalu terpusat ini menciptakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan publik. Pada akhirnya, krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an memicu jatuhnya orde baru, mengakhiri lebih dari tiga dekade pemerintahan otoriter. Era Reformasi (1998- sekarang) reformasi membawa perubahan drastis dalam sistem pemerintahan Indonesia, ditandai dengan desentralisasi kekuasaan dan penerapan demokrasi multipartai. Reformasi ini terinspirasi oleh ideologi demokrasi liberal, yang

menekankan kebebasan politik, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Meskipun demikian, proses transisi ini tidak terlepas dari tantangan. Desentralisasi sering diiringi oleh ketidakseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah, munculnya praktik korupsi di tingkat lokal, dan fragmentasi politik. Di tengah pluralisme politik yang semakin kuat, muncul kekhawatiran mengenai potensi radikalisme ideologis, baik dari kelompok konservatif agama maupun dari kelompok yang mendukung otoritarianisme baru. Namun sistem demokrasi yang lebih terbuka juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses politik, memperkuat peran masyarakat sipil, serta memperbaiki institusi- institusi demokrasi.

Pengaruh Ideologi Global sepanjang sejarahnya, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh ideologi global, terutama pada masa perang dingin dan setelahnya. Pada masa awal kemerdekaan, ideologi sosialisme dan komunisme dari Uni Soviet serta kapitalisme dari Barat mempengaruhi banyak keputusan politik dalam negeri. Pada masa Orde Baru, Indonesia lebih condong ke blok barat dan mengadopsi elemen-elemen kapitalisme dalam kebijakan ekonomi. Setelah Reformasi, pengaruh ideologi liberalisme semakin kuat dengan penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan ekonomi, dan desentralisasi. Namun, globalisasi ideologi ini sering kali berbenturan dengan nilai-nilai lokal dan nasional yang terkandung dalam Pancasila, menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, perubahan ideologi di Indonesia memberikan dampak yang kompleks terhadap sistem pemerintahan. Dari pemerintahan yang otoriter hingga lebih demokratis, peran ideologi dalam membentuk kebijakan negara sangat jelas. Pancasila tetap menjadi landasan ideologi negara, tetapi pelaksanaannya sering kali mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan politik setiap era. Untuk masa depan, Indonesia perlu mempertahankan keseimbangan antara ideologi nasional dan tantangan ideologi global, serta beradaptasi dengan dinamika politik tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental terkandung dalam Pancasila. Hanya dengan demikian, stabilitas politik dan integritas pemerintahan dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Saran

Dalam menghadapi dampak perubahan ideologi terhadap sistem pemerintahan Indonesia, beberapa langkah strategi perlu diambil. Pertama, ideologi pendidikan Pancasila harus diperkuat di semua jenjang pendidikan untuk memastikan generasi muda memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penguatan kelembagaan demokrasi, seperti parlemen dan lembaga yudikatif, sangat penting agar dapat berfungsi optimal dalam mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil juga krusial, karena partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan membantu menciptakan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai masalah sosial.

Dalam konteks desentralisasi, pengawasan yang ketat terhadap kebijakan otonomi daerah perlu diterapkan untuk mencegah perlindungan kekuasaan dan korupsi. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia harus diperkuat, dengan memberikan dukungan yang memadai bagi lembaga penegak hukum agar menjalankan tugas mereka secara profesional dan independen. Adaptasi terhadap globalisasi juga menjadi hal yang penting, di mana Indonesia perlu mengembangkan strategi yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan tuntutan globalisasi. Terakhir, penelitian dan kajian berkelanjutan tentang dampak perubahan ideologi terhadap sistem pemerintahan dan masyarakat perlu dilakukan untuk memberikan wawasan yang berguna dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menahan tantangan ideologi dan politik yang kompleks, serta meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Agus. A.A. 2016. Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Office*, 2(2), 229-238.

Alfian, Dr. 1993. Indonesia: Ideologi dan Politik dalam Lintasan Sejarah. Pustaka Utama Grafiti,

Arsyad, L.2017. Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Tersedia secara online di: http://www. pustaka. ut. ac. id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.

Dasfordate, A. 2022. Pertentangan Ideologi Antar Tokoh Nasional Dalam Mencari Format Kenegaraan Awal Kemerdekaan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*: Media Kajian Pendidikan Sejarah, Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 174-184.

Hadi, S. 2006. Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional. Yayasan Obor Indonesia.

Ine Ariyani dan Taupan, M. "Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan" (2017): 2015. http://www.fkip.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/Hasil-Tes-Online2015.pdf.

Liddle, R. William. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia: Dari Orde Lama ke Era Reformasi. Gamedia.

Mietzner, Marcus. 2013. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. *Institute of Southeast Asian Studies*.

Noviati, C. E. 2013. Demokrasi dan sistem pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 333-354.

Nuradhawati., R. 2019. Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal Academia Praja. 2(1).

Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. 2012. Bahan Ajar. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvesioanal.

Taupan. M dan Ariyani. I. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung:yrama widya.

Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2003. *Economic Development, Eight Edition. England: Pearson Education Limited*